



ANALISIS BELANJA DAERAH KOTA BAUBAU

Sarnani

Universitas Halu Oleo, Indonesia

Corresponding Author: sarnaniesp14@gmail.com

<p>Info Article Received : 01 April 2022 Revised : 03 Mei 2022 Accepted : 01 Juli 2022 Publication : 30 Juli 2022</p>	<p>Abstract: <i>This study aims to determine the factors that affect Regional Expenditures. This research will be carried out in Bau-bau City in April 2018 until it is completed. At the office of the regional financial and property management agency (BPKBMD). The results of this study indicate that from the results of partial coefficient testing (t test) it can be concluded that: (1). the explanatory variable of Regional Original Income (X1) with regional expenditure in the city of Bau-bau has no significant effect, which means that it does not match the hypothesis. This variable describes the role of PAD in financing regional expenditures in each region where expenditure consists of direct expenditure and indirect expenditure. Where PAD experienced a decline in regional spending by -10,809. (2). The Balanced Funds variable (X2) with regional expenditures in the city of Baubau has no significant effect, which means that it does not match the hypothesis. A 1% increase in Balancing Funds in each Baubau City regional expenditure will cause an increase in regional spending in each region of 3,181 t-testers prove that the t-statistical value is in the H0 receiving area, meaning that the independent variable balancing funds has no significant effect on the City's regional expenditure variable.</i></p>
<p>Keywords: Regional Expenditures, Regional Financial, Property Management Agency</p> <p>Kata Kunci: Belanja Daerah, Keuangan, Badan Milik Daerah</p>	<p>Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Belanja Daerah. Penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Bau-bau pada April 2018 sampai selesai. Di kantor badan pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah (BPKBMD). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari hasil pengujian koefisien secara parsial (uji t) dapat disimpulkan bahwa: (1). variabel penjelasan Pendapatan Asli Daerah (X¹) dengan belanja daerah kota bau-bau tidak berpengaruh signifikan, yang berarti tidak sesuai hipotesa. Variabel ini menggambarkan peranan PAD dalam membiayai belanja daerah pada masing-masing daerah yang mana belanja terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Di mana PAD mengalami penurunan terhadap belanja daerah sebesar -10.809. (2). Variabel Dana Perimbangan (X²) dengan belanja daerah kota baubau tidak berpengaruh signifikan, yang berarti tidak sesuai hipotesa. Kenaikan 1% Dana Perimbangan pada setiap belanja daerah Kota Baubau akan menyebabkan kenaikan belanja daerah di masing-masing daerah sebesar 3.181 pengujian t membuktikan bahwa nilai t-statistik berada pada daerah penerimaan H₀, artinya variabel independen dana perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel belanja daerah Kota Baubau.</p>
<p><i>Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License</i></p> 	

PENDAHULUAN

Otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk meningkatkan kapabilitas dan efektivitas dalam menjalankan roda pemerintah namun pada kenyataannya pemerintah daerah umumnya belum menjalankan fungsi dan peranan secara efisien, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah. Kondisi seperti ini muncul karena pendapatan umum yang digunakan dalam penentuan besar alokasi dana untuk setiap kegiatan adalah pendekatan inkremental yang dapat didasarkan pada perubahan satu atau lebih variabel yang bersifat umum seperti tingkat inflasi dan jumlah penduduk. Anggaran pendapatan pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan APBD, dimana penyusunan anggaran pendapatan mempunyai arti penting bagi pemerintah daerah dalam membantu kelancaran roda pembangunan dan memberikan isi dan arti kepada tanggung jawab pemerintah daerah khususnya pemerintah daerah kota Bau-Bau sehingga tercipta perencanaan dan pelaksanaan yang efektif.

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia dokumen anggaran daerah tersebut anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun kabupaten dan kota.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Di dalam APBD tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah (UU Keuangan Negara, 2002).

Struktur APBD yang terbaru adalah berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Bentuk dan susunan APBD yang didasarkan pada pemendagri No 13 tahun 2006 pasal 22 ayat (1) terdiri atas 3 bagian yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Menurut pemendagri Nomor 13 tahun 2006. Pendapatan dibagi menjadi tiga kategori yaitu pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Belanja daerah diklasifikasikan menjadi beberapa macam yaitu : klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan. Klasifikasi belanja menurut urusan wajib mencakup : pendidikan kesehatan, pekerjaan umum, pelayanan rakyat, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup pertanahan, kependudukan, dan catatan sipil. Pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, dan keluarga sejahtera, sosial,

tenaga kerja, koperasi dan usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayaan, pemuda dan olahraga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemerintahan umum, kepegawaian, pemberdayaan masyarakat, dan desa-desa, statistik, arsip dan komunikasi informatika. Sedangkan klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keseluruhan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari : pelayanan umum, ketertiban dan ketentraman, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan pariwisata dan budaya, pendidikan dan perlindungan sosial.

Pendapatan daerah merupakan penerimaan yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan daerah guna membiayai proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan daerah. Berdasarkan peraturan pemerintah republik indonesia No 105 tahun 2000 tentang "pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah "yang diikutip dari buku "himpunan peraturan pelaksanaan UU otonomi daerah" yang dimaksud dengan pendapatan daerah adalah "semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah ". (2002:113). Belanja daerah menurut Pemendagri No 25 Tahun 2009 adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Belanja langsung menurut pemendagri No 13 tahun 2006 merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :

1. Belanja pegawai untuk mengeluarkan honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah
2. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program.
3. Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan kegiatan pemerintah, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan asset tetap lainnya.

Belanja tidak langsung menurut pemendagri No 13 tahun 2006 merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari sebagai berikut :

1. Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, menengah, dan panjang.
3. Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
4. Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pembelian hibah` dalam bentuk uang, barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
5. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian dalam bentuk uang dan atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6. Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan propinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
7. Belanja bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari propinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan atau peningkatan kemampuan keuangan.
8. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulangseperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Pemerintah daerah justru semakin menggantungkan diri pada Dana Alokasi Umum (DAU) dari pada pengupayaan meningkatkan Penerimaan Asli Daerah (PAD). Penelitian serupa yang dilakukan oleh Adi (2007), memperlihatkan indikasi kurang seriusnya daerah dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki dengan lebih mengandalkan penerimaan DAU yang bersifat hibah. besarnya nilai transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam membentuk dana

perimbangan, seharusnya menjadi insentif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Belanja daerah mencerminkan kebijakan pemerintah daerah dan arah pembangunan daerah dan arah pembangunan daerah, maka dari itu analisis terhadap belanja daerah seharusnya dilakukan untuk dijadikan dasar evaluasi dan koreksi. Belanja yang dilakukan oleh pemerintah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Yang dilakukan terhadap pemerintah daerah di kota Bau-bau menyatakan bahwa belanja atau pengeluaran pemerintah baik rutin maupun pembangunan memberika pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi keseluruhan propinsi-propinsi di indonesia. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Belanja Daerah di Kota Bau-bau.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan April tahun 2018 selesai sampai bertempat di Kota Baubau. Di kantor badan pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah (BPKBMD). Penelitian ini menggunakan Belanja Daerah sebagai Variabel dependen, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari dokumen Laporan Realisasi APBD Kota Baubau yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah di internet. Dari laporan Realisasi APBD diperoleh data mengenai jumlah realisasi anggaran Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum.

Metode pengambilan data sekunder, data dikumpulkan dengan metode dokumentasi. Ini dilakukan dengan mengumpulkan, mencatat dan menghitung data-data yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode dengan mengambil satu populasi yaitu Kota Baubau.

Penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Secara umum, pendekatan kuantitatif lebih fokus pada tujuan untuk generalisasi, dengan melakukan pengujian statistic dan steril dari pengaruh subjektif peneliti (Sekaran, 1992). Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Analisis regresi berganda adalah analisis mengenai beberapa variabel independen dengan satu variabel dependen. Dalam analisis regresi selain mengukur seberapa besar hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, juga menunjukkan

bagaimana hubungan antara variabel independen dengan dependen, sehingga dapat membedakan variabel independen dengan variabel dependen tersebut (Ghozali, 2006). Dimana dalam penelitian ini, dua komponen dari pendapatan daerah yaitu PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagai variabel independen, akan dianalisis belanja daerah Kota Baubau sebagai variabel dependen.

Penyajian statistic deskriptif bertujuan agar dapat dilihat profil dari data penelitian tersebut dengan hubungan yang ada antar variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain-lain pendapatan daerah yang sah dan Belanja Daerah.

Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda linear yang digunakan untuk melihat pengaruh pendapatan yaitu PAD, Dana Perimbangan, Lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap belanja daerah (belanja langsung dan belanja tidak langsung). Data diolah dengan bantuan software SPSS Versi 21. Pengujian hipotesis dengan menggunakan model analisis regresi variabel independen dengan variabel dependen (sekarang, 1992). Persamaan regresinya adalah :

$$Y : \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + c$$

Dimana

Y = Belanja Daerah

X₁ = PAD

X₂ = Dana Perimbangan

X₃ = Lain-lain pendapatan daerah yang sah

α = konstan

$\beta_1 \beta_2 \beta_3$ = koefisien regresi untuk masing-masing variabel X

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Sejak awal terbentuk kota Baubau menjadi daerah otonom telah terbentuk 4 kecamatan antara lain kecamatan Betoambari, kecamatan Wolio, kecamatan sorawolio dan kecamatan Bungi dengan 9 desa dan 29 kelurahan selanjutnya pada tahun 2004 berupa menjadi 38 kelurahan sampai pada tahun 2006 baru ada pembentukan 2 kecamatan baru yaitu kecamatan Murhum (pecahan dari kecamatan Betoambari) dan kecamatan kokalukuna (pecahan dari kecamatan Wolio). Pada tahun 2008 terbentuk

kecamatan Lea-lea pecahan dari kecamatan bungi, sehingga terbentuk 7 kecamatan dan 43 kelurahan di kota baubau. Pada bulan juni tahun 2012 terjadi pemekran wilayah yakni Kecamatan Batupoaro (pecahan dari Kecamatan Murhum) sehingga terbentuk 8 kecamatan dengan 43 kelurahan.

Table 4.2 PAD Kota Baubau Tahun 2012-2017

Tahun	Pendapatan Asli Daerah
2012	24,305
2013	21,600
2014	40,382
2015	49,332
2016	49,406
2017	60,649

Sumber : Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah

Dari table 4.2 di atas dapat di lihat bahwa yang menduduki nilai Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2017 sebesar Rp. 60,649 (dalam jutaan rupiah) yang di antaranya dari penerimaan pajak, retribusi daerah dan penerimaan lain-lain. Desentralisasi fiscal akibat diberlakunya otonomi daerah juga membawa dampak pada nilai pendapatan daerah yang rata-rata meningkat setiap tahunnya terutama pada tahun 2014 dan 2015. Kenaikan pendapatan ini dipacu oleh penerapan otonomi daerah yang mengharuskan setiap tahun harus mampu menggali potensi daerahnya sendiri guna membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan daerah tersebut. tapi pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar Rp. 21,600.

Tabel 4.3 Dana Perimbangan Kota Baubau Tahun 2013-2017

Tahun	Pendapatan Asli Daerah
2012	427,383
2013	485,862
2014	518,274
2015	559,134
2016	725,892
2017	714,643

Sumber : Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah

Pada tabel 4.3 di atas dapat di lihat bahwa yang menduduki nilai pertama Dana Perimbangan tahun 2016 sebesar Rp. 725,892 (dalam jutaan rupiah) yang di antaranya terdiri dari dana Bagi Hasil bukan pajak dan Dana Alokasi Umum serta Dana Alokasi Khusus yang merupakan cerminan dari potensi dari daerah tersebut. nilai pendapatan

daerah yang rata-rata meningkat setiap tahunnya terutama pada tahun 2015 dan 2016 . tetapi pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar Rp. 714,643

Tabel 4.4 Lain-lain Pendapatan yang Sah Kota Baubau Tahun 2013-2017

Tahun	Pendapatan Asli Daerah
2012	48,587
2013	106,442
2014	71,328
2015	104,912
2016	158,875
2017	22,437

Sumber : Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah

Pada tabel 4.4 di atas dapat di lihat bahwa yang menduduki nilai pertama Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2016 sebesar Rp. 158,875 (dalam jutaan rupiah) yang di antaranya terdiri Hibah, Dana Darurat, Dana bagi hasil dari Provinsi dan Pemda lainnya, Dana penyesuaian dan otonomi khususn, Bantuan keuangan dari Provnsi atau Pemnda lainnya. nilai rata-rata lain-lain pendapatan yang sah adalah sebesar 85,430. tetapi pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar Rp. 2

Tabel 4.5 Belanja Daerah Kota Baubau Tahun 2013-2017

Tahun	Pendapatan Asli Daerah
2012	513,587
2013	357,278
2014	411,077
2015	419,359
2016	1,027,930
2017	847,355

Sumber : Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah

	N	Maks	Min	Sum	Mean	SD	Variance
PAD	6	21600	60649	24567	40945.67	15372.7	236322699.46
Dana Perimbangan	6	427383	725892	3431188	571864.67	122813.2	083102397.46

Lain2 Pendapatan yg sah	6	22437	158875	512581	85430.17	48455.3	672347922318.96
Belanja Daerah	6	357278	1027930	3576586	596097.67	275289.4	775784291671
Valid N (listwise)	6						

Pada tabel 4.5 di atas dapat di lihat bahwa yang menduduki nilai pertama Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2016 sebesar Rp. 1,027,930 yang di antaranya terdiri belanja langsung dan belanja tidak langsung nilai rata-rata belnja daerah adalah sebesar 596,097. tetapi pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar Rp.357,278. Data yang digunakan adalah data panel yang merupakan antara data time series dan cross section dari Kota Baubau pada tahun period 2012-2017, didasari karena pada periode tersebut terjadi kebijakan baru dalam pemerintahan dengan diberlakukannya otonomi daerah yang mendorong terjadinya desentralisasi fiscal

series dan cross section dari Kota Baubau pada tahun period 2012-2017, didasari karena pada periode tersebut terjadi kebijakan baru dalam pemerintahan dengan diberlakukannya otonomi daerah yang mendorong terjadinya desentralisasi fiscal dalam keuangan daerah. Hasil pengujian statistic deskriptif untuk variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, Belanja Daerah untuk tahun 2012-2017 dapat di lihat sebagai berikut :

1. Nilai terendah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu Rp.21.600 yang merupakan PAD pada tahun 2012 dan PAD tertinggi adalah Rp.60,649 yang diperoleh pada tahun 2017.
2. Nilai terendah pada Dana Perimbangan adalah 427,383 yang merupakan dana perimbangan pada tahun 2012 dan dana perimbangan tertinggi adalah Rp.725,892 yang diperoleh pada tahun 2016.
3. Nilai terendah Lain-lain pendapatan yang sah adalah 22,437 yang merupan lain-lain pendapatan yang sah pada tahun 2017 dan lain-lain pendapatan yang sah tertinggi adalah 158,875.
4. Nilai terendah pada Belanja daerah adalah Rp.357,278 yang merupakan belanja daerah pada tahun 2013 dan belanja daerah yang tertinggi adalah 1,027,930 pada tahun 2016.
5. Rata-rata PAD adalah 40,945,67 ; Rata-rata Dana Perimbangan adalah 571,864,67 ; Rata-rata Lain-lain pendapatan yang sah adalah 85,430,17 ; dan Rata-rata Belanja Daerah adalah 596,097,67.

Uji Asumsi pertama yang di lakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan uji normalitas data melalui analisis statistik dengan menggunakan uji statistik One-Sampel Kolmogorov-Smirnov.

Kriteria pengujian adalah

H_0 : Data residual berdistribusi normal

H_1 : Data residual tidak berdistribusi normal.

Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0.05 maka H_0 di terima dan sebaran data berdistribusi normal, sedangkan H_0 ditolak jika nilai signifikasinya lebih kecil dari 0.05. Berikut adalah hasil Kolmogorov-Smirnov bantuan software SPSS 22.0 yang menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi belanja daerah. Model regresi yang bebas dari multikolinieritas memiliki nilai VIF di bawah 10 dan nilai tolerance di atas 0,1. Berdasarkan hasil uji multikolinieritas di peroleh nilai VIF untuk variabel $X_1 = 5,054$, $X_2 = 5,272$, $X_3 = 1,389$ sangat jauh dari 10 dan tolerance di atas 0,1. Dengan demikian dalam model regresi tidak terdapat multikolinieritas. Untuk lebih jelas dapat di lihat pada tabel berikut. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis regresi berganda. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian Diduga faktor-faktor yang mempengaruhi Belanja Daerah Kota Baubau antara lain PAD(X_1), Dana Perimbangan(X_2), dan Lain-lain pendapatan yang sah(X_3). Perbedaan antara pendapatan asli daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah untuk menguji apakah secara parsial variabel-variabel bebas tersebut berpengaruh secara signifikan, dan untuk mengetahui besarnya koefisien determinasi baik secara parsial. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan bantuan laptop program SPSS for windows Release 22 diperoleh hasil seperti yang terangkumm dalam tabel berikut

Tabel 4.12

Variabel independen	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-709751.816	438945.453		-1.617	.247
PAD	-10.809	11.787	-0.604	-.917	.456
Dana Perimbangan	3.181	1.507	1.419	2.111	.169
Lain-lain Pendapatan yang sah	-0.827	1.960	146	-.422	.714

R = 0.910

F hitung = 3.221

R² = 0.829

sig. = 0,246

Adjusted R² = 0.571

Berikut : $Y = (-709751,816) + (-10.809)X_1 + 3,181X_2 + (-0.827)X_3$

$Y = -709751,816 - 10,809X_1 + 3,181X_2 - 0.827X_3$

Artinya :

- Koefesien regresi untuk variabel Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Perimbangan (X2), Lain-Lain Pendapatanyang Sah (X3) menunjukn pengaruh terhadap belanja daerah Kota Baubau (Y).
- Konstan $\alpha = -709715,816$ jika PAD, jumlah dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah adalah 0, maka belanja daerah nilainya negative sebesar : Rp. - 709715,816.
- Koefesien $\beta_1 = -10.809$ jika PAD mengalami kenaikan 1% maka belanja daerah akan mengalami penurunan sebesar Rp. 10,809. Koefesien bernilai negative antara PAD dengan Belanja Daerah, semakin naik PAD maka semakin menurun Belanja Daerah.
- koefesien $\beta_2 = 3,181$ jika Dana Perimbangan mengalami kenaikan 1% maka belanja daerah akan megalami kenaikan sebesar Rp. 3,181 koefesien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara dana perimbangan dengan belanja daerah, semakin naik dana perimbangan maka semakin meningkat pula belanja daerah.
- Koefesien $\beta_3 = 0,827$ jika Lain-lain pendapatan yang sah mengalami kenaikan 1% maka belanja daerah akan mengalami penurunan sebesar 0,827. Koefesien bernilai negative antara lain-lain pendapatan yang sah dan belanja daerah, semakin naik lain-lain pendapatan yang sah maka semakin menurun belanja daerah.

Koefesien determinasi (R^2) dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Jika R^2 mendekati 1, ini menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama berpengaruh terhadap variabel dependen sehingga model yang digunakan dapat dikatakan baik. Dari hasil olahan analisis regresi dapat diketahui *adjusted R squared* sebesar 0.571. Hal ini menunjukkan bahwa variabel besaran belanja daerah Kota Baubau benar-benar dijelaskan oleh variabel pendapatan asli daerah (X_1), dana perimbangan (X_2), dan lain-lain pendapatan yang sah (X_3) terhadap besaran belanja daerah di Kota Baubau sebesar 57,1% dan 42,9% di jelaskan oleh variabel-variabel lain di luar penelitian ini.

Uji f digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel independen (Priyanto,2010). Dari hasil regresi di peroleh nilai F 3.221 dengan signifikasi 0,246. Dengan harga signifikasi di atas 0,05 maka dapat di katakan bahwa “Tidak ada pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-lain

Pendapatan yang sah terhadap Belanja Daerah di Kota Baubau tahun 2012-2017” di tolak. Besarnya kontribusi antara sumbangan yang diberikan oleh variabel PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah terhadap belanja daerah secara bersama-sama dapat diketahui dari nilai koefisien determinasi ganda atau R^2 . Maka R^2 berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan SPSS 22.0 di peroleh sebesar 0,571. Dengan demikian maka tidak terlalu berpengaruh terhadap variabel PAD, dana perimbangan, lain-lain pendapatan yang sah terhadap belanja daerah secara bersama-sama sebesar 57,1%.

Uji ini untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi $\alpha < 0,05$, maka dapat di katakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen secara individu. Sebaliknya jika nilai signifikansi $\alpha > 0,05$ maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan (Santoso, 2000 : 168).

Sumbangan ketiga variabel bebas PAD, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah terhadap belanja daerah secara parsial sebagai berikut

Table 4.13 Hasil uji parsial berdasar uji t pada persamaan regresi linear berganda

No	Variabel	T	Sig	Sig. 5 %	Kesimpulan
1	PAD	-0,917	0,456	> 5 persen	Secara parsial tidak berpengaruh terhadap belanja daerah
2	Dana perimbangan	2,111	0,169	> 5 persen	Secara parsial tidak berpengaruh terhadap belanja daerah
3	Lain-lain pendapatan yang sah	-0,422	0,714	> 5 persen	Secara parsial tidak berpengaruh terhadap belanja daerah

Sumber : diolah di SPSS 22.0

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap belanja daerah pada Kota Baubau. Penjelasannya dapat dilihat dari hasil persamaan analisis regresi berganda, PAD mempunyai koefisien beta sebesar -10.809 dengan nilai t hitung sebesar -0,917 dan taraf signifikan sebesar 0,456 karena tingkat signifikan $0,456 > 0,05$, ini berarti variabel PAD (X1) tidak berpengaruh

signifikan terhadap belanja daerah (Y). Stine (1994) menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program layanan public, sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerah, baik pajak dan retribusi. Karena kecilnya penyerapan pendapatan pemerintah daerah yang digunakan belanja, maka hubungan PAD dan belanja daerah berlawanan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap belanja daerah Kota Baubau. Penjelasannya dapat dilihat persamaan analisis regresi berganda, dana perimbangan mempunyai koefisien beta sebesar 3.181 dengan t hitung sebesar 2,111 dan taraf signifikan 0,169 karena tingkat signifikan $0,169 > 0,05$, ini berarti variabel Dana Perimbangan (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah (Y).

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Lain-lain pendapatan yang sah tidak berpengaruh terhadap belanja daerah Kota Baubau. Penjelasannya dapat dilihat persamaan analisis regresi berganda, dana perimbangan mempunyai koefisien beta sebesar -0.827 dengan t hitung sebesar -0,422 dan taraf signifikan 0,714 karena tingkat signifikan $0,714 > 0,05$, ini berarti variabel lain-lain pendapatan yang sah (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah (Y).

KESIMPULAN

Dari hasil pengujian koefisien secara parsial (uji t) dapat disimpulkan bahwa variabel penjelasan Pendapatan Asli Daerah (X1) dengan belanja daerah kota baubau tidak berpengaruh signifikan, yang berarti tidak sesuai hipotesa. Variabel ini menggambarkan peranan PAD dalam membiayai belanja daerah pada masing-masing daerah yang mana belanja terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Di mana PAD mengalami penurunan terhadap belanja daerah sebesar -10.809.

Variabel Dana Perimbangan (X2) dengan belanja daerah kota baubau tidak berpengaruh signifikan, yang berarti tidak sesuai hipotesa. Kenaikan 1% Dana Perimbangan pada setiap belanja daerah Kota Baubau akan menyebabkan kenaikan belanja daerah di masing-masing daerah sebesar 3.181 pengujian t membuktikan bahwa nilai t-statistik berada pada daerah penerimaan H_0 , artinya variabel independen dana perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel belanja daerah Kota Baubau. Dengan kata lain dana perimbangan tidak mampu mempengaruhi secara signifikan terhadap belanja daerah.

Variabel Lain-lain pendapatan yang sah (X3) dengan belanja daerah kota baubau tidak berpengaruh signifikan, yang berarti tidak sesuai hipotesa. Kenaikan 1% lain-lain

pendapatan yang sah pada setiap belanja daerah Kota Baubau akan menyebabkan kenaikan belanja daerah di masing-masing daerah sebesar -0.827 pengujian t membuktikan bahwa nilai t -statistik berada pada daerah penerimaan H_0 , artinya variabel independen dana perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel belanja daerah Kota Baubau. Dengan kata lain dana perimbangan tidak mampu mempengaruhi secara signifikan terhadap belanja daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Priyo Hari, (2007). KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM ERA OTONOMI DAN RELEVANSINYA DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI. Makalah *the 1st Accounting convergence*.
- Pemandagri No. 13. Tahun 2006, Tentang PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.
- Dalam Halim. (2001). MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Dalam Abdul Halim, (2002), AKUTANSI SEKTOR PUBLIK AKUTANSI KEUANGAN DAERAH Salemba Empat.
- Gujarati, Damodar, (2003), APLIKASI ANALISIS DENGAN PROGRAM SPSS. Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Key, V.O. (1940). THE LACK OF BUDGETARY THEORY. American political Science Review 24 (desember),
- IASC Frame Work, (2002), AKUTANSI KEUANGAN DAERAH.
- Pemandagri, No. 25 Tahun 2009, Tentang PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri, No. 13. Tahun 2006 Tentang PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor, 55. Tahun 2005 Tentang DANA PERIMBANGAN.
- Susilo, Gideon Tri Budi dan Priyo Hari Adi. (2007). ANALISIS KINERJA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEBELUM DAN SESUDAH OTONOMI DAERAH (STUDI EMPIRIS DI PROPINSI JAWA TENGAH). Paper di Sajikan Pada Konferensi Penelitian Akutansi dan Keuangan Sektor Publik Pertama. Surabaya.